

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori Terkait Judul

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Hubungan Antar Masyarakat Beragama

Keberagamaan adalah kata yang mengandung arti sifat, keadaan atau kata kerja yang berasal dari kata dasar agama dan dibentuk menjadi beragama, lalu diberi imbuhan *ke-* dan *-an* sehingga menjadi keberagamaan. Dalam bahasa Indonesia, kata yang mendapatkan imbuhan *ke-* dan *-an* mengandung makna, sebagai sifat atau keadaan, seperti *kebekuan* (keadaan membeku), *kebesaran* (keadaan membesar), *kerajinan*, *kepekaan*, *kejujuran* dan lain-lain. Keberagamaan berarti keadaan atau sifat orang-orang beragama, yang meliputi keadaan dan sifat atau corak pemahaman, semangat dan tingkat kepatuhannya untuk melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, dan keadaan perilaku hidupnya sehari-hari setelah ia menjadi penganut suatu agama.¹

Dalam masyarakat yang multigama, multietnik, dan multibudaya seperti Indonesia, hubungan antargolongan masyarakat harus ditata dan diatur dengan baik agar tidak terjadi benturan kepentingan antarumat beragama dan tidak terjadi konflik komunal atau konflik horizontal.² Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan kita adalah masyarakat yang beragam hubungan antara etnik, tidak peduli itu etnik mayoritas dengan minoritas, kelompok dominan dengan kelompok subordinasi, kelompok kuat dengan kelompok lemah, kelompok saudagar dengan sawi (anak buah), dan seterusnya. Jika berhubungan dengan antar etnik, siapapun tidak dapat mengelak dari konsep interaksi, karena interaksi sosial merupakan awal dari relasi sosial dan komunikasi sosial antar manusia. Jhonson mengutip dari Simmel, mengatakan bahwa kehidupan sosial merupakan pola-pola interaksi yang kompleks antar individu. Untuk memahami kehidupan sosial, haruslah memperhatikan interaksi sosial, karena interaksi sosial merupakan proses. Setiap orang

¹ Adon Nasrullah Jamaludin, *Agama dan konflik Sosial: Studi Kerukunan Umat Beragama, Radikalisme, dan konflik Antarumat Beragama*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 86.

² Faisal Ismail, *Dinamika Kerukunan Antarumat Beragama*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 34.

yang berbuat dan terlibat dalam proses tersebut itulah yang disebut relasi dengan orang lain.³

Hubungan antar masyarakat beragama adalah hubungan antar penganut agama sebagai golongan umat beragama yang terbuka sehingga memungkinkan dan memudahkan untuk saling berhubungan. Apabila anggota dari suatu golongan umat beragama telah berhubungan baik dengan anggota golongan agama-agama lain memungkinkan untuk membentuk hubungan berbagai kerjasama dalam bermasyarakat dan bernegara. Perbedaan golongan hanyalah sebagai pendorong untuk saling mengenal, memahami, dan berhubungan. Hal ini mengantarkan pada kesatuan dan kesamaan pandangan setiap golongan dalam membangun dunia yang diamanatkan oleh Tuhan kepadanya dengan istilah lain, banyak agama, satu Tuhan.⁴

Ruang lingkup hubungan antar masyarakat beragama adalah

a. Toleransi

Menurut Umar Hasyim, toleransi adalah pemberian kebebasan kepada sesama manusia atau kepada sesama warga masyarakat untuk menjalankan keyakinannya atau mengatur hidupnya dan menentukan nasib masing-masing, selama dalam hidupnya dan menentukan sikapnya itu tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan syarat-syarat atas terciptanya ketertiban dan perdamaian dalam masyarakat.⁵ Makna esensial toleransi terletak pada sikap kita yang adil, jujur, objektif, dan membolehkan orang lain memiliki pendapat, praktik, ras, agama, nasionalitas, dan hal-hal lain yang berbeda dari kita. Dalam prinsip toleransi itu jelas tentang adanya “pembolehan” (*allowance*) terhadap perbedaan, kemajemukan, kebhinekaan, dan keberagaman baik sebagai masyarakat, umat, atau bangsa. Prinsip toleransi adalah menolak dan tidak membenarkan sikap fanatik dan kefanatikan.⁶

b. Kerjasama

Perlunya kerjasama dalam membentuk kerukunan antarumat beragama, didasarkan pada argumentasi bahwa Kerukunan

³ Alo Liliweri, *Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultural*, (Yogyakarta: LKiS, 2005), 124-125.

⁴ Adon Nasrullah Jamaludin, *Agama dan konflik Sosial: Studi Kerukunan Umat Beragama, Radikalisme, dan konflik Antarumat Beragama*, 112.

⁵ *Ibid*, 108.

⁶ Faisal Ismail, *Dinamika Kerukunan AntarUmat Beragama*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2014), 6.

Antarumat Beragama (KUB) sejatinya bukan sekedar dimana tidak ada konflik, tetapi KUB mengandung makna bahwa hidup dalam konteks pluralitas harus menunjung tinggi prinsip saling menghormati dan menghargai dalam segala aktivitas. Bentuk lain dari hubungan antarumat beragama dimaksudkan dengan dapat dikembangkan dengan kerjasama, dengan melakukan sesuatu secara bersama-sama antarumat beragama, saling membantu, menghormati, menghargai dan menjunjung prinsip toleransi. Aktifitas bersama ini tentu memiliki banyak manfaat, karena secara tidak langsung membuat frekuensi pertemuan antar komunitas umat beragama menjadi sering, sehingga dapat menciptakan kebersamaan. Disamping itu, kebersamaan yang terbangun secara terus menerus, juga dapat menumbuhkan jiwa persaudaraan sekaligus jiwa toleransi dan menghargai.⁷

c. Kebebasan

Hak asasi manusia yang paling esensial dalam hidup adalah hak kemerdekaan/ kebebasan, baik kebebasan untuk berpikir maupun kebebasan untuk berkehendak dan kebebasan dalam memilih kepercayaan/ agama. Etika dalam sikap toleransi setelah memberikan kebebasan beragama adalah menghormati eksistensi agama lain dengan pengertian menghormati keragaman dan perbedaan ajaran-ajaran yang terdapat disetiap agama dan kepercayaan yang ada, baik yang diakui maupun belum diakui oleh negara.⁸

2. Beragam Hubungan Antar Masyarakat Beragama

Di Indonesia hubungan antarumat beragama lebih dikenal dengan pemakaian nama kerukunan hidup antarumat beragama atau toleransi. Istilah “Kerukunan Hidup Antarumat Beragama” bukanlah istilah baru. Istilah ini ada sejak diselenggarakannya Musyawarah Antar Agama yang diselenggarakan pada tanggal 30 November 1967 oleh Pemerintah dan berlangsung di gedung Dewan Pertimbangan Agung (DPA) Jakarta. Musyawarah ini berawal dari persoalan-persoalan yang menyangkut agama-agama di negeri ini, hal tersebut juga sebagai realisasi dari keanekaragaman suku, bahasa, adat istiadat, dan agama yang

⁷ Abdul Jamil Wahab, dkk, *Pelangi Agama di Ufuk Indonesia*, (Jakarta: Pusat Kerukunan Umat Beragama, 2016), 195-196.

⁸ Adon Nasrullah Jamaludin, *Agama dan konflik Sosial: Studi Kerukunan Umat Beragama, Radikalisme, dan konflik Antarumat Beragama*, 110.

sesungguhnya sudah menjadi kenyataan dan diterima sebagai kekayaan bangsa kita.⁹

Adapun kaitannya dengan agama, hubungan beragama adalah hubungan toleransi yang mencakup masalah keyakinan pada diri manusia yang berhubungan dengan akidah atau berhubungan dengan ketuhanan yang diyakininya. Seseorang harus diberi kebebasan untuk meyakini dan memeluk agama masing-masing yang dipilih serta memberikan penghormatan atas pelaksanaan ajaran-ajaran yang dianut atau diyakininya.¹⁰ Pemerintah secara resmi menggunakan terminologi untuk konsep hubungan toleransi hidup umat beragama mencakup tiga hubungan, yaitu hubungan antarumat beragama, hubungan intern umat beragama, dan hubungan antar umat beragama dengan pemerintah. Uraian masing-masing sebagai berikut.

a. Hubungan Antar Umat Beragama

Hubungan antar umat Beragama merupakan bentuk hubungan eksternal umat beragama yang memeluk beda-beda agama. Misalnya antara umat Islam dengan umat Kristen, Hindu dengan Islam dan seterusnya. Hubungan antar umat beragama sudah pasti agama menjadi isu sentral dari pertemuan antarumat beragama. Agama menurut Anslem Vor Feurbach dikutip dari Samsudin, dalam bentuk apapun ia muncul tetap merupakan kebutuhan ideal manusia. Oleh karena itu agama sangat penting dalam setiap kehidupan manusia dan tanpa agama, manusia diyakini tidak akan mencapai kesempurnaan. Berkaitan dengan hal tersebut setiap pemeluk agama pasti akan memberi diri dan berkorban demi agama yang dipeluknya. Dalam pertemuan tersebut akan menimbulkan isu penting antarumat beragama sehingga akan menimbulkan konflik, maka diperlukannya hubungan antar umat beragama untuk saling memahami masing-masing pemeluk agama dan pentingnya menjaga hubungan sosial dan interaksi sosial dalam keberagamaan.¹¹

b. Hubungan Intern Umat Beragama

Hubungan intern umat beragama merupakan kerukunan yang ada dalam satu agama. Dalam Islam sendiri terdapat ormas-

⁹ *Ibid*, 95.

¹⁰ *Ibid*, 109.

¹¹ Samsudin, *Kerukunan Umat Beragama: Dialektika Fundamentalisme Agama Dan Interaksi Sosial Keagamaan Masyarakat di Kabupaten Bengkulu Tengah*, (Bengkulu Tengah: CV. Zigie Utama, 2018), 82-83.

ormas Islam seperti NU, Persis, Muhammadiyah, dan lainnya. Di antara ormas-ormas tersebut sering terjadi perselisih paham yang berdampak pada kebingungan umat dalam menjalankan keyakinannya. Oleh karena itu pembinaan kerukunan internal umat beragama perlu ditingkatkan agar tidak terjadi pertentangan antara pemuka agama dan umatnya, juga menghindari pertentangan bersifat doktriner. Sebagaimana dikutip oleh Samsudin, menurut Alamsyah Ratu Perwiranegara, segala macam persoalan yang timbul di lingkungan internal umat beragama hendaknya dapat diselesaikan dengan semangat kerukunan, tenggang rasa, dan semangat kekeluargaan yang sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Tanpa hal tersebut akan selalu diselimuti konflik yang berkepanjangan. Perpecahan tersebut justru akan memberikan citra yang jelek terhadap pemuka agama lain bahwa pemuka agamanya tidak mempunyai semangat kerukunan. Karena itu setiap perbedaan ajaran suatu agama yang bersifat doktrinal harus dapat dijelaskan oleh pemuka agamanya agar dapat dimengerti oleh semua pihak.¹²

c. Hubungan Umat Beragama dengan Pemerintah

Kerukunan umat beragama telah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam No. 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Pasal 1 angka (1) menyatakan bahwa “Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.¹³ Kementerian Agama berupaya mewujudkan toleransi antar umat beragama dengan memberikan bermacam-macam pandangan. Pertama, meluaskan sikap saling menghargai dan menerima adanya perbedaan. Kedua, menghormati kesetaraan antar pemeluk agama sebagai warga

¹² Adon Nasrullah Jamaludin, *Agama dan konflik Sosial: Studi Kerukunan Umat Beragama, Radikalisme, dan konflik Antarumat Beragama*, 97-98

¹³ Aris Darmansyah, dkk. *Model Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama*, (Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2018), 6.

negara dengan hak dan kewajibannya. Ketiga, warga negara mempunyai kehendak untuk saling melindungi dan menjaga. Keempat, di dalam kehidupan berpolitik, hendaknya para pejabat politik tidak memanfaatkan isu agama untuk kepentingan kelompoknya.¹⁴

3. Pola Hubungan Antar Masyarakat

Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan yang selalu berada dalam hubungan antar etnik, tidak peduli itu etnik mayoritas dengan minoritas, kelompok dominan dengan kelompok subordinasi, kelompok kuat dengan kelompok lemah, kelompok saudagar dengan sawi (anak buah), dan seterusnya.

Jika berhubungan dengan antaretnik, kita tidak dapat mengelak dari konsep interaksi, karena interaksi sosial merupakan awal dari relasi sosial dan komunikasi sosial antarmanusia. Kehidupan sosial merupakan pola-pola interaksi yang kompleks antara individu. Setiap orang yang berbuat dan terlibat dalam proses tersebut itulah yang disebut relasi dengan orang lain.¹⁵ Beragam corak hubungan dalam relasi dengan orang lain, termasuk dengan umat beragama lain, juga dengan kelompok lain adalah sebagai berikut :

a. Eksklusivisme

Eksklusivisme, yaitu kebenaran mutlak yang dimiliki atau pendapat tertentu secara eksklusif. Klaim ini tidak memberikan jalan keluar yang lain. Ia tidak memberikan konsesi sedikitpun dan tidak mengenal kompromi. Ia memandang kebenaran secara hitam-putih. Klaim kebenaran mutlak ini secara umum ada dalam setiap agama. Akan tetapi, ia terepresentasikan secara demonstratif oleh agama-agama semitik: Yudaisme, Kristen, dan Islam, yang masing-masing saling mengecap bahwa dirinyalah yang paling benar.¹⁶ Contoh sikap eksklusivisme adalah masyarakat yang beragama Islam dan Kristen, yang beragama Kristen memiliki sikap cenderung memisahkan diri dari masyarakat yang beragama Islam dan kurang berinteraksi dengan baik

¹⁴ *Ibid*, 12.

¹⁵ Alo Liliweri, *Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultural*, (Yogyakarta: LKiS, 2005), 124-125.

¹⁶ Adon Nasrullah Jamaludin, *Agama dan konflik Sosial: Studi Kerukunan Umat Beragama, Radikalisme, dan konflik Antarumat Beragama*, 89.

dengan lingkungannya. Contoh dalam lingkungan masyarakat yaitu terjadinya terorisme dikarenakan terlalu fanatisme dengan agamanya sehingga menimbulkan keinginan untuk memusnahkan seluruh orang yang berbeda agama dengan pelaku terorisme, diskriminasi terhadap orang yang berbeda agama karena menurutnya agamanyalah yang paling benar sehingga terjadilah kekerasan, dan lain sebagainya. Sikap semacam ini tak jarang juga dimiliki oleh pengikut mazhab ataupun organisasi keagamaan yang memiliki pendapat yang berbeda. Mereka seringkali mendaku merasa lebih benar atau lebih baik dibanding yang lain.

b. Inklusivisme

Inklusivisme, yaitu pengakuan kebenaran mutlak yang lebih lapang. Inklusivisme masih tetap mempercayai bahwa hanya salah atau satu pendapat yang benar secara mutlak. Klaim inklusivisme ingin menarik sikap netral, antara eksklusivisme dan pluralisme.¹⁷ Contoh sikap inklusivisme adalah saling berperan aktif dalam masyarakat desa atau kota misalnya gotong-royong, saling membantu sama lain, menghargai perbedaan berpendapat, agama, ras etnik, dan meskipun berbeda agama atau pendapat namun dalam hal itu masih ada rasa untuk mempertahankan ajaran atau keyakinan yang dianutnya.

c. Pluralisme

- 1) Dalam kamus Bahasa Inggris, kata *plural* diartikan dengan *pertaining or involving a plurality of persons or things* (berkenaan atau melibatkan banyak orang atau hal). Kata *pluralism* (pluralisme) diartikan dengan *a theory that reality consists of two or more independent elements* (suatu teori bahwa kenyataan terjadi dari dua unsur independen atau lebih). Kata *plurality* (pluralitas) diartikan *state or fact of being plural* (keadaan atau fakta yang bercorak majemuk).¹⁸
- 2) Menurut Mahfudz Ridwan, pada dasarnya pluralisme adalah sebuah pengakuan akan hukum Tuhan yang

¹⁷ *Ibid*, 89-90.

¹⁸ Faisal Ismail, *Sejarah Dan Kebudayaan Islam periode klasik (abad VII-XIII M)*, (Yogyakarta: Diva Press, 2017), 33-34.

menciptakan manusia yang tidak hanya terdiri dari kelompok, suku, warna kulit, dan agama saja. Tuhan menciptakan manusia berbeda-beda agar mereka bisa saling belajar, bergaul, dan membantu antara satu dan lainnya. Pluralisme mengakui perbedaan-perbedaan itu sebagai sebuah realitas yang pasti ada dimana saja. Justru, dengan pluralisme itu akan tergali berbagai komitmen bersama untuk memperjuangkan sesuatu yang melampaui kepentingan kelompok dan agamanya. Kepentingan itu antara lain adalah perjuangan penegakkan keadilan, kemanusiaan, pengentasan kemiskinan, dan kemajuan pendidikan.¹⁹

- 3) Menurut Budhi Munawar Rachman, pluralisme adalah penghormatan terhadap fakta keberbagaian, dengan tetap berpatokan pada keyakinan sendiri, dan tidak harus menganggap bahwa semua keyakinan itu adalah sama.²⁰

Dari berbagai pengertian tentang pluralisme di atas dapat disimpulkan bahwa pluralisme adalah keadaan di mana Tuhan menciptakan manusia yang berbeda-beda agar saling membantu satu dengan yang lain dan menciptakan komunikasi yang menjembatani suatu ketidaktahuan antar manusia dengan cara menghormati setiap keyakinan. Contoh biasanya pluralisme itu sikap yang tidak bisa ditolak dalam masyarakat karena banyaknya keberagaman di dalam masyarakat tersebut misalnya ada Islam, Kristen, Hindu, Budha, dan Khatolik. Masyarakat tidak bisa menolak akan keberagaman agama tersebut. Masyarakat yang bersikap plural akan menyatakan sikap keterbukaan terhadap agama lain yang bersedia menerima kenyataan bahwa dalam masyarakat memiliki cara hidup, berbudaya dan berbeda keyakinan agama contohnya saling kerjasama dalam masyarakat.

¹⁹ Dalam diskusi Islam *Rahmatan lil alamin* dalam kegiatan sehari bersama santri (mahasiswa Fak. Teologi UKSW: 2008) di Pondok Pesantren Edi Mancoro, dalam pandangan dan Pemikiran Mahfud Ridwan tentang Pluralisme Agama.

²⁰ Budhy Munawar Rachman, *Argumen Islam untuk Pluralisme*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana, 2010), 42.

4. Mewujudkan Relasi Damai Dalam Masyarakat Plural-Multikultural

Indonesia adalah negara yang terdiri banyak pulau terbesar di dunia dan Indonesia sekaligus sebagai negara dengan suku, agama dan bahasa terbanyak di dunia. Melihat banyaknya keanekaragaman di Indonesia tentu tidaklah mudah bagi Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dan kerukunan. Karena semakin beragam, semakin tinggi pula potensi konflik sosial yang akan muncul. Baik konflik sosial yang berlatar belakang ekonomi, politik, budaya, ataupun yang berbasis agama. Tidak jarang sebuah konflik pecah hanya dipicu masalah miskomunikasi atau ketidakpahaman terhadap aturan/regulasi.²¹ Perdamaian tidak hanya didefinisikan sebagai keadaan tanpa peperangan, namun sebagai menjalin hubungan antarindividu, kelompok, dan lembaga yang menghargai keragaman (*diversity*) dan perbedaan (*difference*) nilai dan mendorong potensi manusia secara utuh.²²

Persoalan lain yang menonjol dalam multikultural adalah masalah mayoritas-minoritas. Mayoritas atau kelompok dominan adalah kelompok yang merasa memiliki kontrol atau kekuasaan untuk mengontrol. Sedangkan kelompok minoritas kurang atau bahkan tidak berpeluang mendapat kekuasaan seperti mayoritas. Terdapat pandangan lain bahwa masalah mayoritas dan minoritas tidak bergantung terhadap jumlah, tetapi terletak pada siapa yang banyak menguasai atau mendominasi apa dalam suatu masyarakat sebagai contoh, meskipun mayoritas penduduk di Afrika berkulit hitam, tetapi mayoritas penguasa adalah berkulit putih.²³

Kelompok mayoritas atau kelompok dominan dalam suatu masyarakat merupakan kelompok yang merasa memiliki kontrol atau kekuasaan untuk mengontrol. Mereka merupakan sumber daya kekuasaan dalam *setting* institusi yang berbeda-beda. *Setting* institusional itu cenderung lebih penting karena hal tersebut mempengaruhi masyarakat kita, termasuk penyelenggaraan pemerintahan, agama, pendidikan dan pekerjaan (ekonomi). Sebaliknya, kelompok minoritas kurang mempunyai

²¹ Abdul Jamil Wahab, dkk, *Pelangi Agama di Ufuk Indonesia*,(Jakarta: Pusat Kerukunan Umat Beragama , 2016), vii-viii.

²² Darwin Tuwu, *Konflik, Kekerasan, dan Perdamaian*, (Kendari: Literacy Institute, 2018), 142.

²³ Alo Liliweri, *Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultural*, 113.

akses terhadap sumber daya, privilese kurang bahkan tidak berpeluang mendapatkan kekuasaan, dan hal ini dapat mendorong prasangka mayoritas terhadap minoritas, misalnya dengan mengatakan bahwa kelompok minoritas lebih rendah kedudukannya dari kelompok minoritas.²⁴

Dalam menghadapi keadaan mayoritas dan minoritas, kita membutuhkan pengetahuan pluralisme.²⁵ Pada dasarnya pluralisme mendorong perubahan cara berpikir dari cara berpikir monokultur ke cara berpikir multikultur. Perubahan cara berpikir ini dianggap penting, malah bersifat universal, untuk mencegah klaim sebuah kebudayaan bahwa hanya pandangan suatu kebudayaan yang paling benar. Semua kebudayaan itu penting sehingga tidak ada satu kebudayaan pun mengklaim menjadi kebudayaan yang rasionalisasi atas semua kebudayaan lain. Inilah argument yang penting dari pluralisme, dengan kata lain bahwa setiap kebudayaan memiliki norma-norma universal, dan norma-norma tersebut dapat diberlakukan kapan dimana saja, harus diingat bahwa norma-norma universal itu tidak lebih baik daripada validitas kearifan budaya sendiri.²⁶

Pluralisme agama adalah suatu kenyataan bahwa kita adalah berbeda-beda, beragama dan plural dalam hal beragama. Pada kenyataannya pluralisme adalah sesuatu yang tidak dapat dipungkiri. Pluralisme secara sosiologis ini merupakan pengakuan yang tidak berarti mengizinkan pengakuan terhadap kebenaran teologi atau etika dari agama lain. Pandangan pluralismenya tidak berarti adanya pertemuan dalam hal keimanan, namun hanya merupakan pengakuan atas keberadaan agama-agama lain.²⁷ Masing-masing pemeluk agama tersebut memahami hubungan mereka dengan tradisi agama-agama lain maka kesadaran beragama tersebut akan meningkatkan kesadaran pentingnya menjaga hubungan sosial dan interaksi sosial dalam keberagaman. Interaksi sosial berarti hubungan dinamis antara individu dengan individu, individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok. Bentuknya seperti kerjasama, persaingan, pertikaian, tolong-menolong dan gotong royong.

²⁴ *Ibid*, 102.

²⁵ *Ibid*, 105.

²⁶ *Ibid*, 67.

²⁷ Umi Sumbulah, *Pluralisme Agama: Makna dan Lokalitas Pola Kerukunan Antarumat Beragama*, (Malang: UIN-Press, 2013), 14.

Interaksi adalah kunci dari kehidupan sosial, tanpa adanya interaksi tidak akan terjadi kehidupan bersama masyarakat.²⁸

Dalam mewujudkan relasi masyarakat yang plural-multikultural dalam hubungan mayoritas dan minoritas, bisa dikatakan bahwa masyarakat multikultural tidak mempunyai kelompok-kelompok etnik yang berbeda dalam kebudayaan, bahasa, nilai, adat-istiadat, dan tata kelakuan yang diakui sebagai pengetahuan dan jalan positif untuk menciptakan toleransi dalam sebuah komunikasi. Dengan multikulturalisme setiap kelompok etnik dalam suatu komunitas membangun struktur mereka agar mampu melihat diri dan kebutuhan mereka, dan mampu bertukar dan mengartikulasikan kebudayaan dengan bahasanya serta atribut lain dengan kebudayaan lain. Tak satupun kelompok mayoritas yang jumlahnya banyak mendominasi bahasa dan kebudayaan orang lain. Sebuah masyarakat multikultural sendiri merupakan salah satu bentuk variasi dari perbedaan budaya yang mendorong keberadaan suasana yang harmonis, yang bebas untuk mengelola agama mereka yang berbeda, bahasa/ adat sosial mereka yang berbeda. Semua kelompok akan menekankan toleransi budaya, bahasa, dan agama meskipun berbeda satu sama lain agar mereka tidak kehilangan identitas.²⁹

Menurut Parsons, agar sistem sosial dapat bekerja baik, setidaknya harus ada empat fungsi yang harus terintegrasi. Yaitu adaptasi, *goal attainment* atau pencapaian tujuan, *integrasi* atau integrasi, dan *latent pattern maintenance* atau pemelihara pola-pola laten, biasa di sebut AGIL. Pertama, *adaptation* atau adaptasi, yang merupakan fungsi yang sangat penting karena pada fungsi ini sistem harus dapat beradaptasi dengan lingkungannya dari cara menanggulangi, menyesuaikan diri dengan lingkungan dan dapat menyesuaikan lingkungan dengan kebutuhannya. Contoh di Demak sudah terjalin hubungan yang harmonis antar, intern umat beragama. Kedua, *goal attainment* atau pencapaian tujuan, sistem harus memiliki, mendefinisikan, dan mencapai tujuan utamanya, fungsi ini merupakan fungsi kepribadian. Contoh dengan masyarakat Demak yang harmonis maka hal ini interaksi silaturahmi satu sama lain sudah terjalin.

²⁸ Samsudin, *Kerukunan Umat Beragama: Dialektika Fundamentalisme Agama Dan Interaksi Sosial Keagamaan Masyarakat di Kabupaten Bengkulu Tengah*, 83.

²⁹ Alo Liliweri, *Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultural*, 89-90.

Ketiga, *integrasi* atau integrasi, merupakan persyaratan yang berkaitan dengan interaksi antaranggota dalam sistem sosial. Masalah integrasi menunjuk pada kebutuhan untuk menjamin bahwa ikatan emosional yang cukup menghasilkan solidaritas dan kerelaan untuk bekerjasama. Contoh di Demak peran serta pemerintah dalam mengatur hubungan antar umat beragama agar tetap terjalin keharmonisan di dalam suatu sistem masyarakat multikultural. Keempat, *latent pattern maintenance* atau pemelihara pola-pola laten, sistem harus mampu berfungsi sebagai pemeliharaan pola, sebuah sistem harus memelihara dan memperbaiki pola-pola individu dan kultural.³⁰ Contoh masyarakat dihimbau untuk tetap melakukan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk menjaga keharmonisan antar-intern umat beragama di Demak dengan memberlakukan nilai-nilai dan norma-norma di masyarakat.

B. HASIL PENELITIAN TERDAHULU

Sebelum peneliti meneliti dengan judul “*Relasi Damai Mayoritas dan Minoritas (Studi Kasus NU dan LDII di Desa Pilangrejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak)*”, Peneliti menelusuri dan menelaah kepustakaan yang ada kaitannya dengan judul diatas sebagai berikut:

M. Sidi Ritaudin (2011) dengan judul “*Damai di Tengah Masyarakat Multikultural dan Multigama*”. Hasil penelitiannya mengungkapkan fenomena politik di Indonesia yang ditafsirkan dalam bentuk majemuk dan plural. Yang berdasarkan Pancasila dan UUD-1945 yang memosisikan sebagai landasan persatuan. Kebhinekaan tersebut berbentuk toleransi, yang merupakan suatu bingkai persatuan dalam sistem kebangsaan dan kenegaraan yang penduduknya bersifat majemuk, dari segi ras, suku bahasa, adat budaya, agama dan lainnya.³¹ Sedangkan penelitian ini membahas tentang relasi damai mayoritas-minoritas di dalam umat Islam itu sendiri. Persamaannya penelitian ini adalah tentang hubungan masyarakat yang plural dan multikultural.

Rizqi Wahyudi, dkk (2019) dengan judul “*Formula Merawat Damai dan Kerukunan untuk Pembangunan Indonesia yang Berkelanjutan*”. Hasil penelitian ini menunjukkan, cara merawat dan

³⁰ Nanang Martono, *Perubahan Sosial*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2011), 58-60.

³¹ M. Sidi Ritaudin, “Damai di Tengah Masyarakat Multikultural dan Multiagama”, *Jurnal al-Adyan* Vol. VI, no. 2 (2011).

menjaga kedamaian di Indonesia yang majemuk adalah dengan menerapkan komunikasi Islam di kalangan heterogen.³² Sedangkan penelitian ini membahas tentang relasi damai yang sudah terjadi di Desa Pilangrejo. Persamaan penelitian ini adalah membahas tentang kedamaian dalam masyarakat yang majemuk.

Alifa Widiyawati dan Ulya (2019) dengan judul “*Kerukunan Beragama Perspektif Para Pemuka Agama dan Kepercayaan di Karangrowo Kudus*”. Penelitian ini mengkaji konsep kerukunan menurut pemuka agama (kyai, pendeta) dan guru kepercayaan sedulur sikep di Desa Karangrowo. Dari pemuka agama Islam menekankan rahmat dan ukhuwa. Pemuka agama Kristen menekankan cinta kasih Yesus yang harus diberikan seluruh manusia dan guru kepercayaan sedulur sikep menekankan sikap hidup seger waras guyub, rukun, *ngelakoni apik sak rinane sak wengine*. Ajaran tersebut diimplementasikan oleh umat agama maupun kepercayaan dalam perilaku dan kegiatan-kegiatan berbasis keagamaan maupun sosial.³³ Sedangkan penelitian ini meneliti tentang hubungan mayoritas dan minoritas dalam hubungan internal umat beragama Islam di lingkungan masyarakat. Persamaannya penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang perilaku dan kegiatan-kegiatan keagamaan dan sosial.

Joko Tri Haryanto (2015) dengan judul “*Relasi Agama Dan Budaya dalam Hubungan Intern Umat Islam*”. Penelitian ini menjelaskan dinamika hubungan intern umat Islam dalam konteks relasi agama dan budaya. Dinamika hubungan intern umat Islam di tiga wilayah ini membuktikan tiga pola relasi, yaitu relasi agama dan tradisi lokal, relasi agama dan etnisitas, serta relasi agama dan pemikiran keagamaan. Dalam ketiga relasi tersebut, terdapat hubungan sosial yang erat dalam hubungan internal umat Islam yaitu dengan adanya relasi agama dan tradisi lokal. Sementara dua bentuk hubungan lainnya yaitu interaksi disosiatif pada relasi intern umat Islam. Relasi agama dan budaya dapat menjadikan taktik dalam upaya membangun keharmonisan internal umat beragama secara umum.³⁴ Sedangkan penelitian ini cenderung mengarah kepada relasi

³² Rizqi Wahyudi, dkk, “Formula Merawat Damai dan Kerukunan Untuk Pembangunan Indonesia yang Berkelanjutan”, *Jurnal Manhaj: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 4, no. 2 (2019).

³³ Alifa Fidiyawati, Ulya, “Kerukunan Beragama Perspektif Para Pemuka Agama dan Kepercayaan di Karangrowo Kudus”, *Jurnal Smart* Vol. 5, no.2 (2019).

³⁴ Joko Tri Haryanto, “Relasi Agama Dan Budaya Dalam Hubungan Intern Umat Islam,” *Jurnal Smart* Vol. 01, no. 01 (2015).

mayoritas dan minoritas intern umat beragama Islam yang memiliki pola yang berbeda dari penelitian tersebut. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang hubungan intern umat Islam.

Suprpto (2012) dengan judul “*Membina Relasi Damai Antara Mayoritas Dan Minoritas (Telaah Kritis Atas Peran Negara Dan Umat Islam Dalam Mengembangkan Demokrasi Di Indonesia)*”, penelitian ini menjelaskan hubungan antara mayoritas Islam dan minoritas non-Islam di Indonesia, yang menyertakan dua isu penting: Kesiapan budaya mayoritas sebagai subjek utama dan konstitusi negara. Berbagai pelanggaran dan diskriminasi HAM yang dialami oleh minoritas yang tidak sekedar dijalankan oleh mayoritas belaka, tetapi juga oleh negara. Maka perlunya advokasi oleh pemerintah dan juga oleh masyarakat mayoritas untuk toleransi.³⁵ Persamaan dari penelitian ini adalah menjelaskan tentang hubungan mayoritas dan minoritas, namun perbedaannya adalah penelitian tersebut meneliti hubungan antar umat beragama sedangkan penelitian ini tentang hubungan intern umat beragama.

Umihani (2019) dengan judul “*Problematika Mayoritas Dan Minoritas Dalam Interaksi Sosial Antar Umat Beragama*”. Penelitian ini menjelaskan Problem mayoritas-minoritas antar umat beragama di Indonesia yang tidak terlalu signifikan karena Indonesia menganut sistem demokrasi. Bahkan penduduk mayoritas Islam di Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan, keadilan dan sangat menolak diskriminasi, kemudian terciptanya kerukunan antar umat beragama di Indonesia, meskipun di berbagai daerah di Indonesia masih banyak terjadi konflik.³⁶ Persamaan dengan penelitian ini adalah meneliti tentang mayoritas-minoritas. Sedangkan perbedaannya terletak pada objeknya, penelitian tersebut objek penelitiannya tentang problem mayoritas-minoritas antar umat beragama di Indonesia sedangkan penelitian ini tentang relasi damai dalam mayoritas-minoritas di Desa Pilangrejo.

Muhammad Aswin (2013) dengan judul “*Model Pola Hubungan Harmonisasi Antar Umat Beragama di Kota Medan*”. Konsep penelitian ini bertujuan untuk penjaringan pola-pola harmonisasi hubungan antar umat beragama di kota medan yang diperlukan dalam mengatasi konflik-konflik sosial dan hubungan

³⁵ Suprpto “*Membina Relasi Damai Antara Mayoritas Dan Minoritas (Telaah Kritis Atas Peran Negara Dan Umat Islam Dalam Mengembangkan Demokrasi Di Indonesia)*”, *Analisis: Jurnal Studi KeIslamman*, Vol. XII , no. 1 (2012)

³⁶ Umihani “*Problematika Mayoritas Dan Minoritas Dalam Interaksi Sosial Antar Umat Beragama*”, *Tazkiya*, Vol. 20, no. 02 (2019).

antar umat beragama yang memerlukan upaya-upaya menciptakan harmonisasi umat beragama dengan mengembangkan konsep kerukunan, toleransi beragama, melalui dialog antar, intern pemeluk agama dan pemerintah.³⁷ Sedangkan penelitian ini meneliti pola-pola hubungan intern umat beragama antara mayoritas-minoritas. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang hubungan umat beragama.

Berbeda dengan penelitian tersebut diatas, jika kelima penelitian di atas banyak mengkaji tentang kerukunan dan toleransi umat beragama, maka penelitian kali ini menekankan pada penelitian relasi intern umat beragama dan peran masing-masing ormas Islam NU dan LDII di Desa Pilangrejo.

C. KERANGKA BERFIKIR

Pilangrejo adalah sebuah desa yang plural masyarakatnya baik dari segi agama maupun ormas agama. Ormas Islam di Desa Pilangrejo terdapat dua ormas yaitu NU dan LDII. NU sebagai mayoritas dan LDII sebagai minoritas, dikatakan demikian karena jumlah warga LDII lebih sedikit dari warga NU yaitu 16 KK dari 1.694 KK atau 66 jiwa dari 5.119 jiwa dan sisanya adalah NU. Selama ini antara warga LDII dan NU di Desa Pilangrejo hidup berdampingan, meskipun memiliki cara beragama yang berbeda, antara lain dalam hal *fiqhiyah*, budaya, dan dalam penyampaian agama. Perbedaan tersebut tidak membuat mereka berkonflik, tetapi hidup harmonis. Antara warga NU dan warga LDII di desa Pilangrejo hidup saling berdampingan dan mereka sama-sama berupaya untuk menciptakan kehidupan yang damai. Kedamaian itu bukan hasil yang dilakukan oleh mayoritas NU yang menetapkan aturan-aturan ketat untuk kehidupan sosial keberagamaan warga minoritas LDII atau warga moinoritas LDII yang memang tunduk dan patuh ada aturan yang dibuat mayoritas, tetapi masing-masing pihak memang tampak bersama-sama hidup dalam berkoeksistensi, saling menjaga harmoni untuk menciptakan kerukunan, tanpa ada sikap dan perilaku dominan-mendominasi antara mayoritas dan minoritas.

Keberagaman agama banyak sekali di Indonesia. Dalam keberagaman tersebut, di dalam Islam sendiri banyak sekali aliran-aliran keislaman. Salah satunya adalah NU, Muhammadiyah, LDII dan lain sebagainya. Banyaknya aliran-aliran tersebut tidak mungkin jika tidak pernah terjadi konflik. Maka perlunya kerukunan intern umat

³⁷ Muhammad Aswin, “ Model Pola Hubungan Harmoniasi Antar Umat Beragama di Kota Medan”, *Jurnal Analytical Islamic*, Vol. 2, no. 2 (2013).

beragama. Hubungan intern umat beragama yang harmonis akan menciptakan suasana damai, aman dan penuh toleran di dalam masyarakat intern umat beragama.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui hubungan mayoritas NU dan minoritas LDII di Desa Pilangrejo serta dapat mewujudkan relasi damai masyarakat plural dan multikultural di Pilangrejo dengan pola hubungan mayoritas dan minoritas, yaitu eksklusivisme, inklusivisme dan pluralisme di dalam masyarakat Pilangrejo. Lewat hubungan mayoritas dan minoritas, NU dan LDII di Desa Pilangrejo dapat mewujudkan relasi damai masyarakat plural dan multikultural di Pilangrejo dengan dijabarkan dengan teori fungsional Talcot Parsons yaitu adaptasi, *goal attainment* atau pencapaian tujuan, integrasi, *latent pattern maintenance* atau pemelihara pola-pola laten atau biasa disebut AGIL.

